

III. METODE PENELITIAN

A. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder didapat dari penelitian kepustakaan antara lain peraturan-peraturan, buku-buku, serta dokumen mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang terdiri dari :

1. Buku-buku tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dinas Pendapatan Daerah, dan Badan Pusat Statistik Kota Metro.
3. Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 1985, yang disempurnakan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994.

Sedangkan data primer diperoleh dari sumbernya yaitu dari hasil penelitian lapangan berupa keterangan dan penjelasan dari narasumber seksi ekstensifikasi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Metro.

B. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan, ditempuh prosedur sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menunjang data sekunder. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung dengan narasumber. Yaitu Seksi ekstensifikasi pada kantor pelayanan Pajak Pratama Kota Metro.

2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lokasi penelitian yang dianggap sesuai dengan fokus penelitian yang diambil melalui dokumen yang ada.

C. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu cara penulisan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan dengan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku secara nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Analisis deskriptif ini akan melukiskan, memamparkan atau menggambarkan kenyataan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, dengan menganalisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, tugas instansi terkait, ketetapan PBB, Laporan perkembangan objek pajak, dan keadaan dan hambatan dalam pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Gambaran Umum Kota Metro (Letak Geografis dan Luas Wilayah Kota Metro)

D.1 Kondisi Umum Kota Metro

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama, jumlah penduduk yang ada di Kota Metro sebanyak 134.682 jiwa, dengan 5 Kecamatan dan luas wilayah 68.74 km², yang secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan data penduduk dan luas wilayah Kota Metro pada Tabel 3, Kecamatan Metro Utara merupakan Kecamatan terluas dengan 19.64 Km. Sedangkan Kecamatan Terpadat adalah Kecamatan Metro Pusat dengan 48.169 Jiwa.

Tabel 3. Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Perkecamatan Kota Metro Tahun 2006 - 2008

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Metro Pusat	11.71	5	48.169
2.	Metro Utara	19.64	4	22.133
3.	Metro Barat	11.28	4	20.931
4.	Metro Timur	11.78	5	30.714
5.	Metro Selatan	14.33	4	12.735
Jumlah / Total		68.74	22	134.682

Sumber : KP Pajak Pratama Kota Metro, 2008

Mengingat Metro Pusat merupakan ibukota kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat dan merupakan daerah kawasan industri maka Kecamatan Metro Pusat dalam pelaksanaan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan Kota Metro adalah salah satu daerah/kecamatan yang merupakan sektor perkotaan.

D.2 Sejarah Singkat Lahirnya Kota Metro

Nama Kota Metro sebenarnya dari Bahasa Jawa 'Mitro' yang berarti sahabat (tempat berkumpulnya orang-orang untuk bersahabat atau menjalin persahabatan) karena di latar belakang dari kolonialisasi yang datang dari berbagai daerah di luar wilayah Sumatra, dan menurut bahasa Belanda Metro berarti pusat (Centrum) dengan demikian yang diartikan sebagai suatu tempat yang setrategis.

Pada zaman pemerintahan Belanda Kota Metro Masih merupakan hutan belantara yang merupakan bagian dari wilayah Margan Nurban, yang kemudian dibuka oleh para kolonialisasi selain Metro juga berbentuk onder distrik yaitu Pekalongan, Batanghari, Sekampung dan Trimuijo.

Sebelum menjadi Kota Administrasi Metro, Kota Metro merupakan wilayah kecamatan yakni Kecamatan Metro Raya dengan 6 kelurahan dan 11 desa. Atas dasar peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan bantul.

Harapan Kota Metro untuk menjadi otonomi Daerah terjadi pada tahun 1999 dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan undang-undang 12 Tahun 1999. Pada saat itu diresmikannya kota metro hanya ada dua kecamatan, kemudian berdasarkan peratran Kota Metro nomor 25 Tahun 2000 tentang pemekaran kelurahan dan kecamatan di Kota Metro, Wilayah Administrasi Pemerintah Kota Metro dimekarkan menjadi 5 Kecamatan yang meliputi 22 kelurahan.

D.3 Struktur Perekonomian Kota Metro

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya sumbangan sektor-sektor dalam memproduksi barang dan jasa. Sektor-sektor ekonomi Kota Metro adalah:

1. Pertanian
2. Industri pengelolaan
3. Listrik, gas dan air bersih

4. Konstruksi
5. Perdagangan, hotel dan restoran
6. Transportasi
7. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan